IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pekon Pardasuka, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat)

Dicky Pranata, Erwin Putubasai, M. Harviend Gilang

Univeritas Sang Bumi Ruwa Jurai
e-mail : dickypranata.1501@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu: pertama, pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka belum berjalan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan mimimnya kemampuan sumber daya aparatur Pekon Pardasuka, sehingga diperlukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan, selain itu kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kedua, Wujud implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan pekon pardasuka ialah, yang mana kepala desa merupakan penganggungjawab pelaksanaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa merupakan konsekuensi dari yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah pekon, segala bentuk pengeluaran, pendapatan telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat pekon kepada bupati melalui camat.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

The purpose of this research is to find out how village funds are managed in Pekon Pardasuka, Ngaras District, Pesisir Barat Regency and to determine the inhibiting factors in managing village funds in Pekon Pardasuka, Ngaras District, Pesisir Barat Regency. The research method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques by way of observation, interviews and documentation. In this study, the conclusions were obtained, namely: first, the management of village funds in Pekon Pardasuka has not run optimally, this is evidenced by the lack of human resource capabilities of Pekon Pardasuka officials, so that technical guidance is needed to improve the ability of government officials, in addition to the lack of transparency in managing village funds. Second, the form of implementation carried out by the Pekon Pardasuka government is, in which the village head is responsible for implementing village funds. Accountability for village funds is a consequence of what was planned and implemented by the village government, all forms of expenditure and income must be accounted for by village officials to the district head through the camat.

Keywords: Village Fund Management, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa saat ini masih menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan, melalui dana desa tersebut dapat memberikan kesempatan terhadap desa-desa di Indonesia supaya bisa memajukan potensi desa dengan melalui progam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara otonom. Apabila dana desa dapat dikelola dengan tepat sasaran serta efektif maka dapat mendorong peningkatan perkonomian serta kesejahteraan masyarakat desa Desa (Fathony, dkk 2019).

Pengelolaan Menurut Afifuddin (2010:3), tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efesien agar tujuan organisasi tercapai. Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut: Menentukan Strategi, Menentukan sarana dan batas tanggung jawab, Menentukan standar kerja yang mencangkup efektivitas dan efisiensi. Dan Pelaksanaan.

Thomas (2013) mengatakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses ataupun suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang

didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2020).

Menurut Chabib (2015: 3) yang terkait pada Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut: Perencanaan Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memprediksi jumlah pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah disusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan

desa. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penatausahaan Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan cara sederhana yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Pelaporan Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. 5. Pertanggungjawaban keuangan desa yaitu suatu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang

beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan dana desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Pekon Pardasuka. Oleh sebab itu, pemerintah menuntut aparatur pekon harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik, yang mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah pekon harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekon Pardasuka adalah salah satu Pekon yang ada di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Pekon Pardasuka memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pekon merupakan nama lain dari desa di Kabupaten Pesisir Barat, Pekon ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat No 18 Tahun 2022 Tentang “Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022”, Pekon Siging mendapatkan Alokasi Dana Pekon sebesar Rp 348.996.000,-. Dengan adanya penyaluran Alokasi Dana Pekon, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan serta diperkuat untuk mencapai harapan tersebut diperlukan pengelolaan keuangan yang baik.

Kebijakan tersebut memaksa aparat Pekon untuk memahami tata cara dan tata pengelolaan dana desa yang baik serta bisa menciptakan masyarakat yang makmur dan Sejahtera. Berkaitan dengan implementasi pengelolaan dana desa harus berlandaskan pada kegiatan berskala lokal, dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi, yang terjadi ialah di Pekon Pardasuka ditemukan permasalahan seperti rendahnya pemahaman dari aparat pemerintah pekon maupun masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban.

Mulyadi (2015:12), mengatakan bahwa “implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan tersebut berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar maupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya”.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

Masalah tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih minimnya pemahaman sumber daya aparatur pekon untuk mengelola laporan hasil pengelolaan dana desa, serta dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dimana usulan dari masyarakat yang masih monoton, program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak

diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa, pemerintah pekan kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang dana desa, sehingga muncul kesalahpahaman karena ketidaktahuan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang tidak sesuai perencanaan. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. Hal tersebut berakibat pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa. Padahal peran serta masyarakat menjadi indikator penting dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis ingin mengambil judul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir

Barat dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, “yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014).”

Arikunto (2016) “memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.” Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian sebagai berikut : 1. Bapak Senna sebagai Sekretaris Pekon Pardasuka. 2. Bapak Abas Hasan sebagai Kasi Keuangan Pekon Pardasuka. 3. Bapak Habibi sebagai Tokoh Adat Pekon Pardasuka. 4. Beni Santri sebagai masyarakat Pekon Pardasuka. 5. Bapak Irwansyah sebagai masyarakat Pekon Pardasuka.

Teknik pengumpulan menurut Sugiyono, data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan”.

Observasi, Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2018) berpendapat bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi bertujuan untuk memperoleh data serta informasi mengenai upaya yang akan dan telah dilakukan. Dengan teknik observasi yang bersifat pasif dimana peneliti tidak ikut serta dalam suatu aktivitas yang diteliti, peneliti dapat melakukan pengamatan bebas yaitu dengan mencatat apa yang menjadi daya tarik, melakukan analisis serta membuat kesimpulan”.

Wawancara, (Sugiyono, 2018) “dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan”. Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur (*semisructure*

interview) dimana peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis namun tidak menyiapkan alternatif jawaban seperti halnya wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur berada pada posisi tengah yaitu penggabungan antara wawancara terstruktur (*structured interview*) dengan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2020).

Menurut Chabib (2015: 3) yang terkait pada Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memprediksi jumlah pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah disusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan desa.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam menggunakan dana desa, hal yang pertama dilakukan ialah dengan menyelesaikan laporan pertanggung jawaban mengenai dana desa ditahun sebelumnya, supaya pada tahun selanjutnya akan mendapat pencairan dana kembali, setelah dana desa cair, maka dilakukan musyawarah desa dengan melibatkan aparat pemerintahan pekon, seperti anggota BPD, RT/RW, Tokoh Adat dan masyarakat Pekon Siging.

Pelaksanaan keuangan desa adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran dan kegiatan dilapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola direkening desa yang

didukung dengan buku yang lengkap dan sah.

Dari hasil wawancara dengan kelima narasumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal tersebut dapat dilihat dari kurang kompetennya aparat pemerintah Pekon Pardasuka dalam pengelolaan dana desa, dikarenakan kurang terampilnya ilmu yang dimiliki, serta kurang informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa terhadap masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang dana desa.

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan cara sederhana yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka sudah berjalan dengan baik, yang mana tugas dari seorang bendahara pekon, dalam hal ini ialah melakukan pencatatan dari setiap

laporan yang diterima baik dalam penerimaan dana maupun pengeluaran dana.

Pelaporan, pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa pelaporan, adanya pelaporan rencana anggaran, realisasi anggaran, dan adanya laporan surat pertanggungjawaban, serta laporan atas usulan masyarakat dalam musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD.

Pertanggung jawaban, ialah suatu realisasi Pelaksanaan (APBDes) yang mana merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan, baik melalui laporan penyelenggaraan pemerintah desa, laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBDes disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa ialah dikarenakan sumber daya manusia yang belum terampil dalam

pengelolaan dana desa, selain itu karena kekosongan jabatan khususnya dibagian bendahara sehingga perlu adanya pendamping dan bimbingan dalam pembuatan laporan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang “Prioritas Penggunaan Dana Desa” Tahun 2017 Pasal 7, menyebutkan “Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri”.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diambil kesimpulan, program dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan kepada perangkat desa, agar bisa mengelola dana desa dengan baik dan benar, yang mana hal tersebut disebabkan adanya kekosongan jabatan dan sumber daya manusia yang masih rendah, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pekon Pardasuka agar memahami dan mengerti mengenai kebijakan dana desa”.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Pekon Pardasuka ialah sebagai berikut ini : a. Sumber daya manusia yang dimiliki aparat pemerintah Pekon Pardasuka belum memadai dalam mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa yang tidak maksimal, sehingga diperlukan bimbingan teknis kepada aparat pemerintah Pekon Pardasuka. b. Keadaan sosial masyarakat Pekon Pardasuka yang cenderung pasif untuk mengikuti kegiatan pemerintahan di Pekon Pardasuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: Pengelolaan dana desa di Pekon Pardasuka belum berjalan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan minimnya kemampuan sumber daya aparatur Pekon Pardasuka, sehingga diperlukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam gotong royong maupun suka rela dalam perencanaan hingga evaluasi pengelolaan dana desa. Wujud

implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan pekon pardasuka ialah, yang mana kepala desa merupakan penganggungjawab pelaksanaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa merupakan konsekuensi dari yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah pekon, segala bentuk pengeluaran, pendapatan telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat pekon kepada bupati melalui camat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Patton B. A. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chabib Soleh dan Heru Rochamansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokus.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 10(3), 41-57.
- Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka 2016), 45.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Dana Desa

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif PT
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Pendidikan: Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D. Bandung:
CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian
Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Thomas.2013, "Pengelolaan Alokasi
Dana Desa Dalam Upaya
Meningkatkan Pembangunan Di
Desa Sebawang Kecamatan
Sesayap Kabupaten Tana
Tidung", eJurnal Pemerintahan
Integratif. Volume 1, Nomor 1,
Hal. 51-64.